

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**

# **OCTOPUSSY**

**Sinergi Penguasa dan Pengusaha  
Tipologi Gurita Korupsi di Banten**



# OCTOPUSSY

## Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten

Pol-06 (xii + 62) 15,5 x 23 cm

---

Penulis:

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**

---

Proofreader: Efriza

Editor: Tim Kreasi Cendekia Pustaka

Desain Sampul: Hans Saputra

Layout isi: Hans Saputra

---

Hak pengarang dilindungi undang-undang

*All rights reserved*

---

*Cetakan I: Mei 2021*

---

Diterbitkan oleh:

Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP)

Jl. Tebet Barat VIII No. 10, Tebet, Jakarta Selatan, 12830

kreasicendekiapustaka@yahoo.com

**Anggota IKAPI DKI Jakarta, Nomor: 568/DKI/2019**

---

ISBN: 978-623-95801-8-6

---

©Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



## **SAMBUTAN REKTOR**

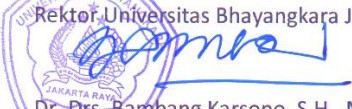
**Irjen Polisi (Purn), Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.,  
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Sebagai upaya mengurai sisi gelap dari desentralisasi dan otonomi daerah, buku ini mengajak kita untuk saling mengingatkan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki, baik dalam lanskap politik lokal maupun pelaksanaan otonomi daerah. Batu pijakan untuk pembahasan berikutnya mengenai *anjakan* dari jawara ke pejabat menjadi sangat relevan. Dalam kasus Korupsi di Banten yang menjadi fokus penelitian dalam buku ini merupakan bukti sinergi antara oligarki-penguasa dengan pengusaha swasta di ranah ekonomi-politik, yang berakar kuat pada adanya kelindan praktik korupsi sehingga menyandera negara (*state-captured corruption*) dengan cara melemahkan fungsi otoritas kelembagaan pemerintahan daerah Banten.

Buku ini berusaha mengulik latar belakang terbentuknya dinasti politik yang cenderung korupsi dan bentuk sinergitas antara penguasa dan pengusaha telah menyelewengkan anggaran daerah. Dengan harapan agar masyarakat dapat memahami dengan baik akar masalahnya seperti korupsi, dinasti politik, politik uang dan masih banyak lagi.

Oleh karena itu, saya menyambut baik penulisan dan penerbitan buku **Octopussy: Sinergi Penguasa-Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten** sebagai bagian untuk membangun kesadaran masyarakat, tidak hanya untuk menjauhi dan memerangi korupsi tetapi membangun budaya dalam bingkai kearifan lokal dan akuntabilitas.

Saya mengapresiasi karya ini sebagai bagian perjuangan dalam memerangi korupsi yang harus kita dukung bersama.

Jakarta, April 2021.  
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,  
  
Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M.  
Inspektur Jenderal Polisi (Purn)

## **KATA PENGANTAR PENERBIT**

Setulus-tulusnya kami panjatkan rasa syukur kami ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kerja keras kami dipermudah dalam langkah kami untuk menerbitkan buku ketiga yang ditulis oleh Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., yang berjudul: "*Octopussy: Sinergi Penguasa dan Pengusaha, Tipologi Gurita Korupsi di Banten*".

Buku referensi ini adalah buku ketiga dari Amalia Syauket yang diterbitkan oleh Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP). Dua buku sebelumnya adalah berupa monograf yang berjudul, *Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia* (2020), dan *Perempuan Dalam Pusaran Korupsi: Telaah pada Penyelenggara Negara* (2019). Berdasarkan ketiga buku ini memperlihatkan bahwa penulis terkonsentrasi dan fasih dalam penelitian mengenai Korupsi.

Dalam tulisannya dijelaskan bahwa terdapat beberapa tipe dinasti politik. Khusus yang terjadi di Banten bertipe *octopussy* karena adanya sinergi antara penguasa dengan pengusaha dalam membentuk dinasti. Hasil penelitiannya di Banten, dapat dianalogikan dengan gurita korupsi berdasarkan realitas yang terjadi di Provinsi Banten. Kepala gurita dianalogikan *local strongman* dan delapan lengan gurita merupakan jejaring yang menjerat APBN, APBD, Aset, SDA dan kehidupan masyarakat Banten yang dilakukan demi mempertahankan kekayaan dan harta keluarga dan para kerabat Klan Ratu Banten.

Jika merujuk berbagai kajian ilmu sosial politik, dijelaskannya, bahwa dikenal juga konsep *shadow state* (negara bayangan), yang bersifat makna peyoratif, yang beroperasi di luar sistem formal oleh aktor-aktor non-negara, namun punya kekuatan besar dalam menentukan arah dan haluan negara formal.

Para pengelola negara bayangan ini membentuk jaringan yang luas, berlapis dan berhierarki —ibarat gurita— menjelma menjadi piramida, yang terjadi di Banten menunjukkan bahwa posisi puncak diduduki oleh penguasa suatu klan tertentu yakni Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Ratu Atut telah membangun dinasti politik melalui pemerintah bayangan (*shadow state*) yang ditransformasikan ke sistem pemerintahan di Banten, yang diarsiteki oleh *local strongman* (*the godfather*) Haji Chasan Sohib, sang Ayahanda.

Haji Chasan Sohib inilah orang kuat lokal di Banten yang telah mendirikan dinasti politik yang terpusat dan terprogram. Agar kedigdayaannya berkembang terus, ia menyesuaikan dengan dinamika politik berupa mengubah tipe oligarkinya yang semula bertipe Sultanik menjadi oligarki penguasa kolektif pada Era Modern. Karena kedua transisi tersebut mengubah konteks pertahanan kekayaan dan sifat ancamannya.

Akhir kata, penyajian tulisan yang runut dan komprehensif dengan disertai analisis kritis menjadikan karya referensi ini sungguh baik untuk dinikmati oleh Pembaca. Singkat kata, Penerbit mengucapkan banyak terima kasih kepada penulis yang untuk kali ketiganya mempercayai naskah terbaiknya

untuk diterbitkan kembali oleh Penerbit Kreasi Cendekia Pustaka (KCP).

Penerbit KCP memiliki komitmen untuk menerbitkan buku yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dengan turut bersemangat menggelorakan perang atas Korupsi yang telah menggerogoti pondasi negara kita Indonesia tercinta.

*Selamat Membaca.*

Jakarta, 3 Mei 2021

Efriza, S.IP., M.Si.

(Direktur Penerbit KCP)

## PRAKATA PENULIS

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan ridha-Nya semata penyusunan buku referensi ini dapat terselesaikan. Buku referensi yang berada di tangan para pembaca ini merupakan salah satu usaha penulis untuk melengkapi bahan rujukan yang telah terserak dibuang sayang.

Terdapat beberapa tipe dinasti politik. Khusus yang terjadi di Banten bertipe *octopussy* karena adanya sinergi antara pengusaha dengan penguasa dalam membentuk dinasti.

Judul buku referensi ini terinspirasi dari film James Bond tahun 1983 yang kemudian dianalogikan dengan gurita korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Kepala gurita dianalogikan sebagai *local strongman* dan delapan lengan merupakan jejaring yang menjerat APBN, APBD, Aset, SDA, dan kehidupan masyarakat Banten demi mempertahankan kekayaan dan harta keluarga dan para kerabat Klan Ratu-Banten.

Buku Referensi dengan judul *Octopussy* ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang panjang dengan menggunakan pendekatan kualitatif bertipe fenomenologi. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan rujukan referensi sekunder. Untuk memperkuat pembahasan dilakukan juga wawancara dengan beberapa pihak yang tidak bersedia disebutkan identitasnya. Metode penelitian



yang dipakai menjawab permasalahan penelitian yaitu: 1. apa yang melatarbelakangi terbentuknya dinasti politik di Banten; dan 2. bagaimana bentuk sinergitas antara penguasa dengan pengusaha seperti yang terjadi di Banten sehingga menimbulkan korupsi.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis wajib berterimakasih kepada bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang secara terus menerus memotivasi dan memfasilitasi untuk berkarya-bekerja secara profesional sesuai dengan proporsionalnya. Ucapan terimakasih juga untuk adinda Hj. Syahrida Syauket, Maulana Syauket, Eniyati Mertapawira serta ananda Ahmad Rais Abdurahman dan Fitri Nur'aini Maulana juga yang tak terlupakan Brury Hotma Simbolon. Penulis berharap semoga buku referensi *Octopussy* ini dapat menambah khasanah pengetahuan dan bermanfaat bagi seluruh pembaca yang budiman.

Fenomena dinasti politik dalam setiap pilkada terus menyeruak. Akan tetapi, contoh dinasti politik di Banten adalah contoh yang sempurna. Karena terjadi sinergitas antara penguasa-secara formal dengan pengusaha-non formal menggangsir dan mencengkeram anggaran negara untuk menambah pundi-pundi pribadi dan keluarganya, dengan modus, Ratu Atut sebagai Gubernur mengatur Perusahaannya Wawan sebagai pemenang tender yang tersebar di separuh daerah otonom di Provinsi Banten.

Penulis,

Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.

# DAFTAR ISI

**Sambutan Rektor ~ iii**  
**Kata Pengantar Penerbit ~ v**  
**Prakata Penulis ~ viii**  
**Daftar isi ~ x**

## **Prolog ~ 1**

### **1**

#### **Banten *Shadow State* ~ 5**

Latar Belakang Pembentukan *Shadow State* Banten ~ 6

Lingkup Keilmuan ~ 13

Perumusan Masalah ~ 13

Tujuan Penelitian ~ 14

Metode Penelitian ~ 14

    Pendekatan Penelitian ~ 14

    Sumber Data ~ 15

    Analisis Data ~ 15

### **2**

#### ***The Godfather* ~ 17**

Kedigdayaan *Local Strongman*, *The Godfather*, Haji

Chasan Sohib di Banten ~ 18

Keluarga Sebagai Embrio Dinasti Politik Banten ~ 26

### **3**

#### **Gurita Korupsi di Banten ~ 35**

Korupsi untuk Pembiayaan Pilkada ~ 40

Modus Pencucian Uang *ala* Wawan ~ 40

**4**

**Tubagus Chaeri Wardana, Pangeran Banten ~ 45**

**5**

**Dampak Korupsi dari Dinasti Politik Ratu Atut ~ 49**

**6**

**Penutup: Harapan Pembaruan Politik Banten ~ 53**

**Catatan ~ 56**

**Daftar Pustaka ~ 59**

**Tentang Penulis ~ 62**



# **PROLOG**

**Irjen Polisi (Purn), Dr. Bibit Samad Rianto, M.M.  
Wakil Ketua KPK/Kepala Pusat Kajian Ilmu  
Kepolisian dan Anti Korupsi  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya**

Bagi saya, korupsi adalah gejala yang dapat tumbuh di mana-mana, apakah dalam sistem politik demokrasi, otoriter, lebih-lebih totaliter. Karena korupsi bukanlah semata-mata akibat sistem politik, sistem politik yang otoriter atau totaliter sekalipun yang alergi pengawasan atau pada sistem politik demokrasi boleh jadi korupsi tumbuh subur menjadi budaya yang terpelihara secara kolektif. Bila Korupsi pada sistem otoriter bersifat perseorangan, maka dalam sistem demokrasi tumbuh berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong.

Dalam kehidupan modern, etika dihubungkan dengan profesi tertentu seperti kedokteran, notaris, pengacara, kemiliteran, kepolitikan, kekuasaan, dan pemerintahan. Berkenaan dengan etika pemerintahan merujuk pada perilaku baik-buruk dalam interaksi pemerintahan, apakah menyangkut personifikasinya, lembaganya, prosesnya ataupun sistemnya dimana semua itu dilaksanakan. Para pemimpin yang terlibat korupsi diawali dari budaya nepotisme dan kolusi. Korupsi dominan mengidap pemimpin yang sedang berkuasa terlebih bila kepemimpinannya absolut dan berakhir di penjara.

Korupsi pada dasarnya merupakan penyakit kronis yang merusak moralitas para penyelenggara negara dan memiliki efek jitu terhadap proses pemiskinan dan/atau sulitnya mengeluarkan rakyat dari belenggu kemiskinan. Betapa tidak, para pejabat dan mitra kerjanya (pebisnis dan sindikatnya) terbiasa menyimpang dari aturan yang berlaku dan mengambil dari uang negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat.

Era desentralisasi dan otonomi daerah, tampaknya telah menjadi bagian dari penyebab marak dan merebaknya praktik korupsi di berbagai daerah, sebagai konsekuensi logis dari adanya otoritas dan anggaran di daerah. Maklum para pejabat yang tampil memimpin dan menguasai daerah merupakan figur yang dipilih atas nama demokrasi saja dengan menonjolkan modal materi, mengabaikan aspek moralitas, integritas dan komitmen kerakyatan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa di era reformasi ini, ternyata semakin banyak aktor yang rakus akan harta, terlihat secara langsung dalam demokralisasi massal dan pelanggaran kemiskinan.

Terdapat fenomena "neo dinasti" yang terbangun di era otonomi daerah sekarang ini. Para Kepala Daerah dalam membangun dinasti politik dengan menancapkan tiga pilar utama selama menjabat. *Pertama*, pilar birokrasi dengan menempatkan orang-orangnya di jajaran pejabat bawahannya untuk memudahkan mengatur, mengarahkan dan mengendalikan berdasarkan kepentingan, orientasi dan rasional subyektif. *Kedua*, pilar bisnis dengan mendistribusikan berbagai proyek (yang berada di seluruh instansi di daerahnya) kepada pengusaha kliennya, keluarganya atau kroni-kroninya melalui tender formalitas termasuk di dalamnya pemberian *good will* untuk urusan bisnis atau investasi yang langsung "diuangkan". *Ketiga*, dengan mendorong dan mendukung barisan keluarganya (anak atau istri/suaminya atau mertuanya, kakak/adik, ipar atau sepupunya) ke berbagai peluang jabatan politik baik di daerah dan di pusat.

Menurut saya, Tindak Pidana Korupsi bisa terjadi pada diri siapa saja apabila di dalam dirinya bertemu empat unsur korupsi yaitu: (1) Ada niat; (2) Mempunyai kemampuan untuk berbuat; (3) Ada kesempatan; dan (4) Ada target yang sesuai. Dan ke semua unsur tadi bertemu pada diri Ratu Atut.

Jakarta, April 2021.

A handwritten signature in blue ink, consisting of the initials 'BSR' followed by a stylized flourish.

Irjen Polisi (Purn). Dr. Bibit Samad Rianto, M.M.



# 1

## **Banten *Shadow State***

Evolusi dari Bandit menjadi Jawara, bertransformasi menjadi Pejabat melalui proses sebagai *Political Boss* di Partai Golkar, mengoptimalkan kesempatan dari momentum reformasi dan otonomi daerah, sembari tetap mempertahankan basis kultural kharismatik tradisional. Interaksi keduanya melahirkan struktur pemerintahan bayangan atau *shadow state*.

## Latar Belakang Pembentukan *Shadow State* Banten

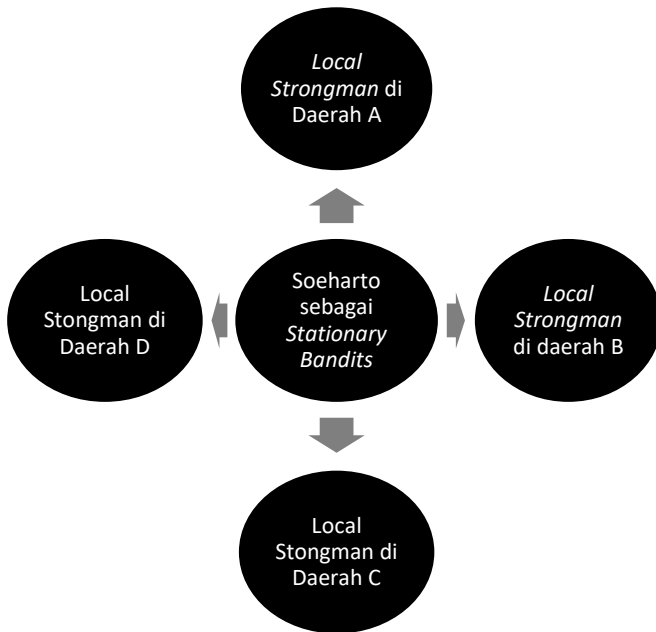
Merujuk pendapat Atika Nur Kusumaningtyas dkk.,<sup>1</sup> Chasan memulai eksistensinya jauh sejak zaman Orde Baru. Melalui perusahaan yang didirikannya, ia menjadi penyuplai kebutuhan logistik Tentara di Divisi Siliwangi, tepatnya pada 1967. Sejak saat itu, Chasan sering memenangkan kontrak pembangunan jalan dan pasar di Banten.

Pada masa Orde Baru pula, Chasan sebagai jawara bersama dengan ulama setempat didapuk menjadi pemimpin informal yang berafiliasi dengan Golkar, partai kuat kala itu. "Hal ini menjadi salah satu modal sosial politik yang sangat penting untuk membangun dinasti politik di Banten," tulis Atika Nur. Semua hal tersebut akhirnya menjadikan Chasan sebagai tokoh paling kuat yang mendominasi Banten.

Setelah Orde Baru tumbang, supremasi trah Chasan di Banten tak lantas tercerabut. Pada masa lalu, oligarki Chasan lebih banyak menggunakan pendekatan kekerasan dan intimidasi untuk meneguhkan kekuasaan.

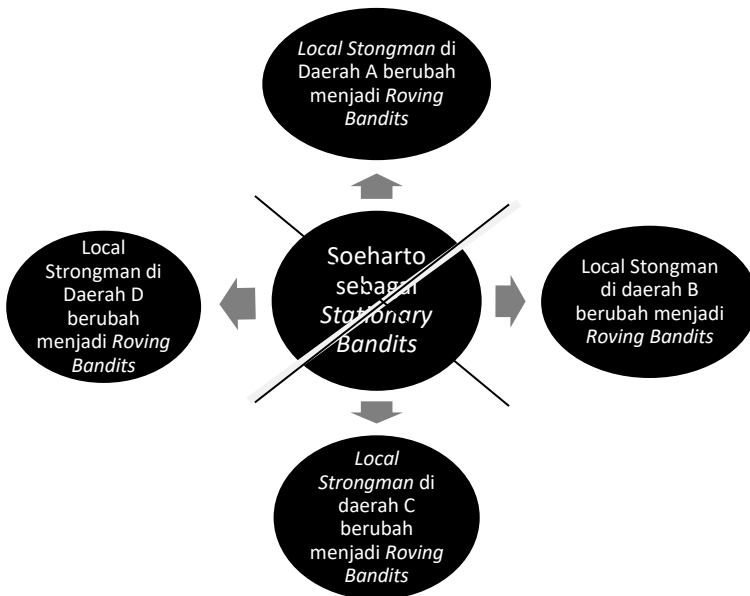
Merujuk pada hasil kajian Oslo<sup>2</sup> Rezim Orde Baru membangun dan memelihara *local strongman* guna menjaga serta mempertahankan kekuasaannya di tingkat daerah. *Local strongman* inilah yang kemudian menjadi cikal-bakal *roving bandit* dengan mengikuti teknik dan cara yang mereka internalisasikan semasa bernaung di bawah rezim orde baru. Semuanya dilakukan berdasarkan perintah dari "atas". Dalam terminologi Oslo<sup>2</sup> disebutkan bahwa

Soeharto disebut sebagai *stationary bandit* – *are rulers with a long - lasting base, they also want to maximize their own incomes*, dengan terjemahan bebas: adalah penguasa dengan basis yang tahan lama, mereka juga ingin memaksimalkan pendapatan mereka sendiri. Soeharto tidak menguras habis kekayaan Indonesia seorang diri, tetapi ia membagi-bagikan konsesi sumber daya kepada kolega, klien dan kroninya, seperti tampak pada Gambar 1. Bahkan Soeharto sengaja membentuk banyak kelompok *local strongman* yang juga mendapat keuntungan dari loyalitas mereka.



Gambar 1: *Stationary Bandits* dalam Orde Baru

Ketika krisis ekonomi pada tahun 1997 yang berujung dengan kejatuhan Soeharto pada tahun 1998, para *local strongman* selaku kroni Soeharto di daerah, telah menjelma menjadi penguasa baru —menggantikan peranan rezim orde baru di aras lokal— dengan menggunakan cara-cara lama ketika mereka mencengkeram daerah. Pada masa inilah para *local strongman* menjelma menjadi bandit baru yang dalam terminologi Oslo<sup>2</sup> disebut sebagai *roving bandit* yaitu *are rulers without a realm of their own who use their armies to maximize their own incomes. In doing so, roving bandits are perpetually moving around, leaving a place after it is plundered. In this respect they are very similar to nomad. The form of organization that results from this behavior is called anarchy* (penguasa tanpa wilayah mereka sendiri yang menggunakan pasukan mereka untuk memaksimalkan pendapatan mereka sendiri. Dalam melakukannya, mereka berkeliling terus-menerus berpindah-pindah, meninggalkan tempat setelah dijarah. Dalam hal ini mereka sangat mirip dengan *Nomand*. Bentuk organisasi yang dihasilkan dari perilaku ini disebut anarki) seperti tampak pada Gambar 2. Perilaku banditisme ini menjadi semakin terlegitimasi dan tertransformasikan ketika Pilkada dan pemekaran daerah dalam sejarah pasca Orde Baru.



Gambar 2: Anjakan *Stationary Bandits* ke *Roving Bandits* pada Orde Reformasi.

Setelah rezim diktator Orde Baru yang merupakan *Stationary Bandit* runtuh, bandit besar hilang seperti di Gambar 2 di atas, maka muncullah apa yang disebut Oslo dengan *roving bandits*. *Roving bandits* adalah bandit jenis berbeda yang saat ini mengambil alih posisi dan peranan yang telah dimainkan oleh bandit besar. Setelah *stationary bandit* (bandit tetap) runtuh maka para *roving bandits* tidak lagi terikat kepada siapa pun secara formal dan bergerak secara anarkis.<sup>3</sup>

Siapakah bandit itu? Menurut Tesaurus Bahasa Indonesia, sinonim bandit adalah preman, bajingan, bajul, bangsat, bromocorah.<sup>4</sup> Dalam istilah lain disebut juga jawara. Bandiyah<sup>5</sup> dalam studinya mengenai periodisasi

perkembangan dan perubahan jawara yang dahulu merupakan seorang bandit, pertama: pada periode sebelum kemerdekaan, pada periode ini jawara dikenal sebagai seorang bandit. Kedua: ketika tidak ada lagi kolonialisme di tanah air, maka peran jawara bergeser menjadi pemimpin dalam masyarakat sosial. Kekayaan yang mereka miliki seperti sumber daya ekonomi dan kekuatan magis yang menyebabkan para jawara dapat bertahan hidup dan melakukan metamorfosa dari tentara secara fisik menjadi pemimpin sosial politik di wilayah yang paling kecil sebagai lurah dalam sebuah desa, penjaga keamanan desa atau guru ilmu silat atau ilmu magis.

Meskipun terjadi pergeseran peran, namun kebanditan jawara masih melekat seperti penggunaan kekerasan yang selalu digunakan untuk mendapatkan keinginan dan kekuasaan. Inilah kemudian yang menjadi stigma negatif terhadap jawara hingga terbawa pada masa Orde Baru. Ketiga: Orde Baru mempergunakan Golongan Karya (Golkar) dan birokrasinya sebagai mesin pengumpul suara demi mempertahankan dominasi kekuatan politiknya. Di daerah-daerah, Golkar mengambil massa subkultural masyarakat seperti jawara untuk dijadikan mesin kerja Orde Baru dalam menguasai politik daerah. Sebagai konsekuensinya, para jawara terkooperasi dan banyak dari para jawara tersebut menjadi kader Golkar yang berperan sebagai mesin untuk memobilisasi massa. Bandiyah lebih lanjut menjelaskan bahwa kedekatan para jawara dengan Partai Golkar yang semakin intens, menyebabkan kelompok jawara pada akhirnya menikmati *privilege* politik dan budaya yang menguntungkan yakni pewarisan hegemoni kekuasaan Partai Golkar dan menciptakan jaringan

kekuasaan terhadap berbagai macam kelompok terutama di jajaran birokrat dan kemampuan berpolitik praktis.

Sementara itu, kedekatan dengan kelompok penguasa telah menyebabkan kelompok jawara ini mendapatkan banyak kemudahan dan fasilitas untuk membangun ekonominya. Puncaknya dikuasainya badan-badan ekonomi nasional di tingkat daerah ke tangan kelompok jawara seperti KADIN, GAPENSI dan HIPMI.

Keempat: Kelompok Jawara kemudian memasuki Orde Reformasi dimulai tahun 1998. Orde Reformasi melahirkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi peluang baru bagi masyarakat Banten untuk merealisasi keinginan lama yang terpendam sejak tahun 1953 yakni mewujudkan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat dan menjadi Provinsi yang mandiri lepas dari Jawa Barat.

Pada akhirnya Banten resmi menjadi provinsi pada tanggal 18 Oktober 2000. Sejarah mencatat, kelahiran Provinsi Banten tidak lepas dari peranan kelompok jawara. Peranan para jawara sangat besar dalam mengawal dan menyukseskan perjuangan ini bersama dengan tokoh masyarakat, ulama, dan rakyat Banten.

Kelima: setelah Banten menjadi provinsi, maka peluang para jawara untuk memasuki ranah pemerintahan daerah menjadi semakin terbuka. Melalui legitimasi dan kepercayaan masyarakat Banten atas perannya dalam menggolongkan Banten menjadi provinsi serta didukung oleh kemampuannya dalam berinteraksi secara politik, maka kelompok jawara dapat dengan mudah memasuki ranah

pemerintahan daerah. Salah satu akses kekuasaan jawara diwujudkan dalam keikutsertaan pengadaan proyek-proyek besar pemerintah daerah bahkan mempunyai andil dalam menentukan kebijakan pemerintah daerah. Puncaknya, akses tertinggi kelompok jawara adalah menjadikan Ratu Atut Chosiyah yang merupakan anak dari sesepuh jawara Banten Haji Chasan Sohib menjadi Wakil Gubernur Banten dan pada akhirnya menjadi orang nomor satu Gubernur Provinsi Banten.

Dengan demikian, proses dari bandit menjadi jawara kemudian menjadi pejabat tidaklah mudah. Ada dua proses yang harus dilalui pertama, faktor internal berupa kemampuan atau strategi yang digunakan jawara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara membangun manajemen hubungan antar jawara, kedua, adanya faktor eksternal yaitu kesempatan yang memungkinkan jawara mengubah diri menjadi makhluk organisasi paling tinggi di masyarakat Banten. Interaksi keduanya melahirkan apa yang disebut sebagai *shadow state* atau negara bayangan.

Dalam tesisnya, Bandiyah<sup>5</sup> menyebutkan yang dimaksud dengan *shadow state* di Banten merupakan keberjayaannya institusi *informal government* jawara yang telah terstruktur dalam nilai-nilai keseharian para jawara, yang menjadi legitimasi kekuatan jawara dalam melakukan kerja di institusi formal Negara (Pemerintah Daerah) sehingga institusi formal tidak berdaya dalam kemandiriannya.



## **Lingkup Keilmuan**

Secara kontekstual, penelitian ini berada dalam ranah keilmuan pemerintahan-politik, karena fokus membahas tentang tata kelola pemerintahan daerah yang tidak transparan, tidak akuntabel yang mengakibatkan terbentuknya dinasti politik, lemahnya pengkaderan dalam partai politik sehingga partai terkooptasi pada pemilik modal juga lemahnya pengawasan dari Pemerintah.

Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi di era transisi pemerintahan, antara era sentralisasi ke era desentralisasi menuju tata pemerintahan yang baik. Provinsi Banten berada pada masa transisi tersebut sejak didirikannya pada tahun 2000.

## **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan lingkup keilmuan di atas, maka perlu adanya pembatasan *scope* bahasan dan dirumuskan dalam masalah penelitian sebagai berikut: 1. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya dinasti politik di Banten; 2. Bagaimana bentuk sinergitas antara penguasa dengan pengusaha seperti yang terjadi di Banten sehingga menimbulkan korupsi.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian yang disusun dalam buku ini bertujuan untuk meneropong dan memahami situasi dan fenomena pemerintahan di Provinsi Banten yang baru terbentuk sejak tahun 2000, berupa tata kelola pemerintahan yang tidak transparan dan tidak pula akuntabel yang mengakibatkan terbentuknya dinasti politik, yang karena kekuasaannya hanya di seputar keluarga atau klan yang masing-masing berperan sebagai penguasa atau penyelenggara pemerintahan daerah dan pengusaha yang saling berkelindan-saling bersinergi. Maka kecenderungan terjadinya korupsi peluangnya sangat besar.

Hasil penelitian ini juga ditujukan kepada Partai Politik untuk mengadakan proses pengkaderan yang transparan tidak terjebak oleh oligarki. Juga mengedukasi kepada masyarakat pada umumnya agar tidak permisif atau masa bodoh dengan kondisi tata kelola pemerintahan daerahnya.

## **Metode Penelitian**

### **Pendekatan Penelitian**

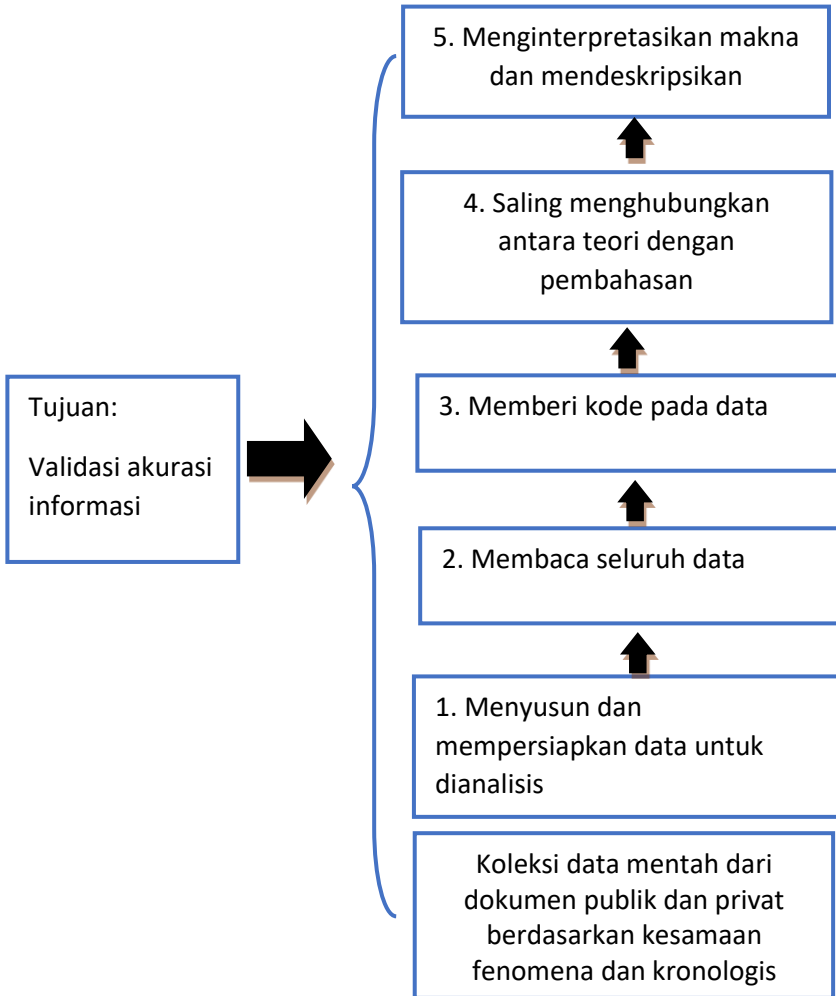
Karena bertujuan untuk meneropong dan memahami situasi dari interaksi sosial maka metode yang tepat adalah dengan pendekatan kualitatif tipe fenomenologi untuk mengungkap latarbelakang terjadinya dinasti politik di Banten dan bentuk sinergitas antara penguasa dengan pengusaha, pembahasan berupa narasi agar mudah dipahami oleh pembaca.

## **Sumber Data**

Sumber data Kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini berupa data sekunder yang terkait dengan tema penelitian ini, terdiri dokumen publik dan dokumen privat serta berbagai sumber dari internet yang berhubungan serta sesuai dengan tema penelitian dan wawancara dengan berbagai informan yang terkait.

## **Analisis Data**

Analisis data<sup>6</sup> dalam penelitian ini merupakan upaya pemeriksaan akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu seperti digambarkan di bawah ini.



# 2

## *The Godfather*

Kedigdayaan *Local Strongman* berkembang menjadi kekuatan *Invisible*, seperti yang diperankan oleh Haji Chasan Sohib dan Wawan dengan tetap berada di luar pemerintahan secara formal namun real dalam kehidupan dan menjerat seluruh sendi tata pemerintahan di Banten.

## **Kedigdayaan *Local Strongman, The Godfather,* Haji Chasan Sohib di Banten**

Desentralisasi tidak serta merta membuat panggung politik menjadi lebih demokratis bisa jadi justru kontraproduktif bila melahirkan apa yang disebut John T. Sidel<sup>7</sup> sebagai *Local Bossism* (Bos Lokal) atau dalam istilah Migdal<sup>8</sup> & Vedi Hadiz<sup>9</sup> disebut *Local strongman*. Di Banten, desentralisasi telah melahirkan orang kuat lokal yang mengakar di daerah. Kedigdayaan orang kuat lokal, didukung kekayaan dan keterampilan politik untuk membeli suara atau memanipulasi kesetiaan agama dan budaya masyarakat.

Orang kuat lokal seperti Haji Chasan di Banten telah mendirikan dinasti politik yang terpusat dan terprogram. Agar kedigdayaannya berkembang terus, ia menyesuaikan dengan dinamika politik berupa mengubah tipe oligarkinya yang semula bertipe Sultanik menjadi oligarki penguasa kolektif pada Era Modern. Karena kedua transisi tersebut mengubah konteks pertahanan kekayaan dan sifat ancamannya.<sup>10</sup>

Kedigdayaan "*Godfather*" Haji Chasan dijelaskan oleh Syarif Hidayat<sup>11</sup> sebagai "*double status champ*" yang berarti jago-pebisnis memiliki pengaruh yang kuat dalam menjalankan pemerintahan daerah di Provinsi Banten. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syarif Hidayat bahwa relasi pemimpin muslim dengan jagoan berstatus ganda menjadi ciri khas identitas sosial di masyarakat Banten.

Menurut Leo Agustino<sup>12</sup> politik lokal di Indonesia mengalami dinamika setelah proklamasi kemerdekaan, ketika kekuatan

rakyat mulai memasuki lembaga formal. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi, keunggulan orang kuat lokal tampak pada:

1. Kesempatan mendapatkan posisi strategis untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga pemerintah daerah. Jika mereka tidak mendapatkan posisi formal, mereka akan memastikan bahwa politisi lokal bergantung pada mereka terkait bantuan apa pun. Apalagi orang kuat lokal itu sendiri yang menguasai pemerintahan di Banten, itulah sebabnya mereka disebut sebagai "*Godfather*".
2. Tidak hanya dari segi ekonomi, keunggulan itu juga dapat diartikan sebagai kekuatan untuk memiliki pengaruh sosial, dan dalam istilah Haji Chasan, ia dengan mudahnya memberikan perintah kepada masyarakat karena kemampuannya dalam memanipulasi sentimen suku, agama, dan budaya untuk menggugah emosi sisi masyarakat di Banten. Semua itu ia lakukan tanpa keringat karena statusnya sebagai bangsawan daerah, pemuka agama, tokoh budaya, sekaligus jawara Banten.

Leo Agustino<sup>12</sup> menyatakan, saat ini evolusi orang-orang kuat lokal di Indonesia sudah menitikberatkan pada sentralisasi kekuasaan yang mengarah pada pembentukan dinasti politik lokal, seperti yang terjadi di Banten saat ini. Mengutip penelitian Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff (2010), evolusi tersebut telah diterapkan sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah dan pembentukan Provinsi Banten melalui pemekaran daerah dari Jawa Barat pada tahun 2000.

Sejak itu, Haji Chasan berperan untuk mengontrol pemerintahan Banten. Pada awal berdirinya provinsi, ia menempatkan putrinya, Ratu Atut Chosiyah sebagai Wakil Gubernur, berpasangan dengan politisi senior dari Partai Persatuan Pembangunan, Djoko Munandar sebagai Gubernur. Tubagus Chasan Sohib, Sang Jawara Banten ini pernah berujar "Sayalah Gubernur Jenderal". Kalimat itu dilontarkan sang Jawara setelah Chasan mengantarkan pasangan Djoko Munandar-Ratu Atut sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2001. Infografis-1 menjelaskannya.

Setelah memahami dinamika politik di daerah, Ratu Atut terpilih menjadi Gubernur Banten sejak 2002 dan menjabat dua kali masa jabatan hingga 2013 sebelum ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Desember 2013.



## Infografis-1: Sang Gubernur Jendral, Arsitek Karir Ratu Atut



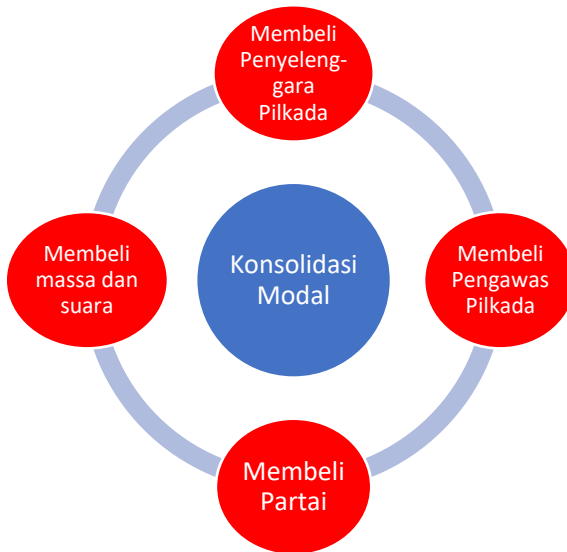
Sumber:

<https://www.google.com/search?q=haji+chasan+sochib&tbm, diakses tgl, 3-11-2000.>

Sejalan dengan pendapatnya Oslo<sup>2</sup> adalah Jeffrey W. Winters,<sup>10</sup> ia menggambarkan bahwa Soeharto adalah Bapak Oligarki Indonesia.<sup>13</sup> Tipe oligarki yang dianut oleh Soeharto adalah Oligarki Sultanik, yakni sebuah rezim yang melakukan akumulasi kekayaan melalui politik patronase yang terpusat berada pada satu tangan oligark bukan negara terlembaga yang dibatasi hukum<sup>14</sup> tetapi pada satu figur; Soeharto, dengan demikian yang kepemimpinannya bersifat pribadi-fokus pada diri Soeharto sendiri, dimana lembaga hukum dan penegakan hukum diperlemah, dan sang pemimpin memerintah melalui penggunaan kekuasaan pemaksaan dan material untuk mengendalikan rasa takut dan imbalan sebagai bagian penting dasar kekuasaan mereka.

Jeffrey W. Winters<sup>10</sup> menjelaskan, Soeharto menciptakan dan memelihara para oligark Indonesia, serta mengorganisasikan mereka di bawah oligarki sultanik yang dia kuasai sendiri. Pada puncak masa kekuasaan sultanik Soeharto, para oligark yang masuk dalam lingkaran dalam presiden menikmati perlindungan maksimal. Tak seorangpun dalam pemerintahan, terutama dalam sistem hukum, berani mengotak-atik orang-orang yang diketahui dekat dengan Soeharto.

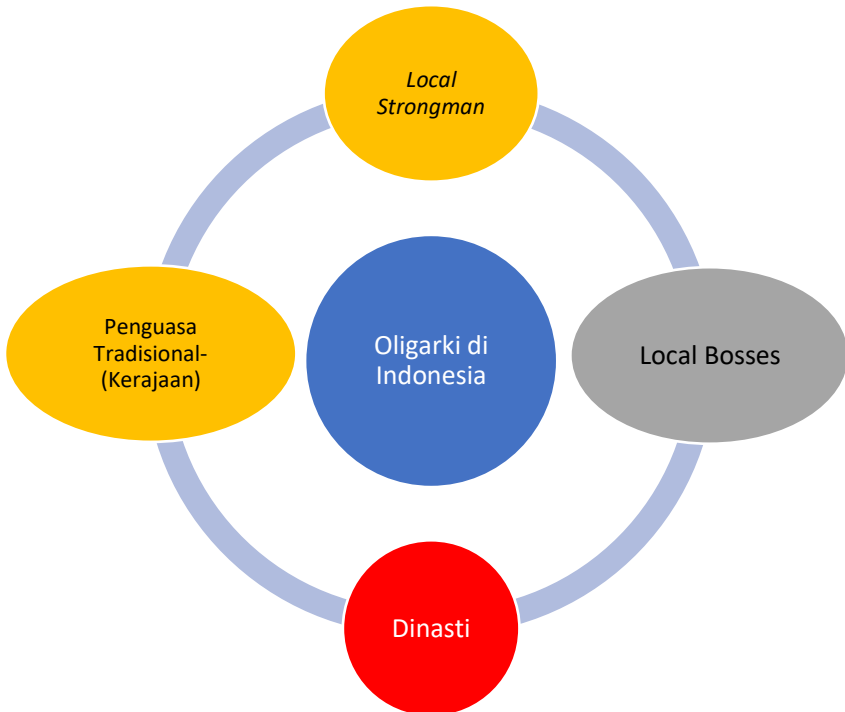
Siapakah mereka para oligark itu? Dalam studi tentang Banten tersebutlah Haji Chasan Sohib, sesepuh jawara, bisnismen, ketua adat Banten dan loyalis Partai Golkar, yang berperan sebagai mesin mobilisasi suara dan massa untuk menopang kekuasaannya dan menstabilkan pemerintahannya. Cara Kerja oligark dalam Pilkada seperti digambarkan di bawah ini.



Ketika rezim Soeharto turun dan oligarki sultanik berakhir, para oligark masing-masing bergerak sendiri dengan menggunakan sumber daya materiil yang pernah didapatnya untuk mempertahankan kekayaan dan hartanya dalam ekonomi politik yang penuh ancaman dan ketidakpastian.

Pengelompokan oligarki di Indonesia pada umumnya seperti dalam lingkaran di bawah ini, yang menunjukkan bahwa keberadaan dinasti politik bukan karena kebetulan tetapi memang sudah ada niat atau keinginan yang kuat dari oligark. Berawal sebagai *local strongman*-tokoh agama, tokoh adat, tokoh ekonomi, kemudian *local bosses* atau *political boss*-di Partai Golkar yang sedang berkuasa ketika itu, seperti hal-nya yang dilakukan Haji Chasan Sohib yang dilanjutkan oleh anak dan kerabatnya. Terdapat tiga hal yang saling bersangkutan paut, antara lain: *Pertama*,

kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas; *Kedua*, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi; dan *Ketiga*, definisi oligark tetap konsisten di berbagai zaman dan kasus.



Haji Chasan Sohib adalah murid yang baik dari maha guru Oligarki Sultanik Indonesia, Soeharto. Sehingga meneladan langsung dalam hal patronase dan kekerabatan untuk mengamankan kekayaan dan pengaruhnya di pemerintahan, politik dan kemasyarakatan.

Dengan Era desentralisasi, kekuatan ekonomi ini berubah *lokus* patron-klien-nya. Kekuatan ekonomi ini beralih pada relasi patronase yang terdesentralisasi. Hal ini mengikuti juga dengan pola beralihnya sebagian kekuasaan kepada Daerah. Apalagi karena adanya Pilkada yang membutuhkan uang sangat banyak untuk kontestasi. Keterlibatan ini pun bisa secara langsung maupun tidak langsung.<sup>10</sup> Kemudian, dengan deregulasi, mereka tetaplah yang paling diuntungkan karena merupakan kekuatan ekonomi yang paling kuat sehingga saat pengaturan dibebaskan di pasar, mereka telah menguasai pasar tersebut.<sup>10</sup>

Karakteristik masyarakat Banten yang taat beragama, sudah sewajarnya menempatkan para guru atau Kyainya sedemikian terhormatnya. Peran Kyai bukan hanya sebagai tokoh agama namun juga pemimpin informal kemasyarakatan pada umumnya, seperti dalam organisasi kesatuan adat-pencak silat yang menjadi ciri khas adat Banten juga sebagai sesepuh Jawara Banten yang memiliki kedigdayaan secara magis, fisik yang mumpuni, dan keberanian. Hal inilah yang menjadi lahan subur untuk timbulnya *local strongman*.

Di sisi lain, dengan karakter tersebut, masyarakat Banten juga terbiasa memberi hikmat kepada Kyai atau pemuka adat sebagai bentuk rasa cinta dan loyalitasnya kepada junjungannya tersebut. Kebiasaan baik tersebut terbawa ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat Banten "terbiasa" membayar untuk mendapat pelayanan kesehatan, pengurusan administrasi kependudukan, juga dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi jabatan.

Sebaliknya, para pemimpin informal pun dengan sangat bersyukur dapat bersedekah kepada masyarakatnya dalam bentuk pembagian sembako misalnya. Hal ini yang kemudian menjadi lahan subur untuk timbulnya politik uang yang merupakan kampanye terselubung dalam Pilkada Banten.

## **Keluarga Sebagai Embrio Dinasti Politik Banten**

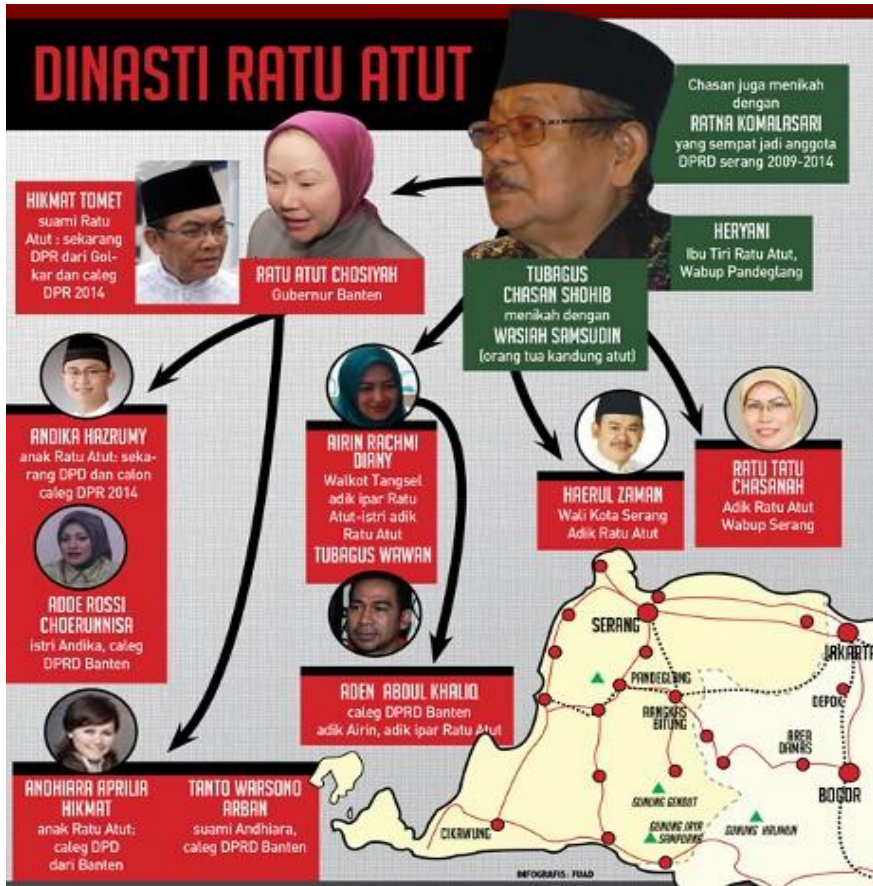
Dinasti yang dimaksud adalah serupa dengan makna dinasti dalam artian politik tradisional. Dimana penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara, dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik dalam pemerintahan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar mereka yang menjadi anggota dinasti politik akan saling “menjaga” agar kekal dalam kekuasaan, disamping agar mampu mengendalikan sumber-sumber ekonomi sesuai dengan tujuan dinasti politik yang dibangunnya.<sup>15</sup> Dengan menempatkan keluarga atau saudara pada jabatan-jabatan strategis akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Chehabi & Linz<sup>14</sup> pada oligarki sultanik, marak dengan hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya.

*Sistem Kekerabatan yang ditransformasikan ke penyelenggaraan pemerintahan menjadi tiang penyangga Dinasti Politik Banten.*

Sekarang dinasti politik telah berhasil menempatkan kerabat, anggota keluarga, dan kroninya di banyak posisi.

Dalam pemerintahan daerah, beberapa anggota keluarga Atut masih menduduki jabatan penting seperti kepala daerah di kota dan kabupaten, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi, Kota, Kabupaten, maupun dunia usaha dan posisi publik lainnya.<sup>16</sup> Infografis-2 menjelaskan sebaran penempatan anggota keluarga Ratu Atut pada empat dari delapan daerah otonom di Provinsi Banten, yang diarsiteki oleh sesepuh jawara, *local strongman*, Haji Chasan Sohib.

## Infografis-2: Sebaran Penempatan Anggota Keluarga Ratu Atut



Sumber:

<https://www.google.com/search?q=haji+chasan+sochib+&tbm=>, diakses tgl, 3-11-2020.



Penempatan anggota keluarga atau kerabat tidak saja di pemerintahan tetapi juga dalam jabatan informal antara lain:

Hikmat Tomet	Suami Ratu Atut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Banten</li> <li>▪ Ketua DPP Golkar Banten</li> </ul>
Andika Hazrumy	Anak	Kordinator Taruna Tanggap Bencana Banten
Ade Rosi Khaerunnisa	Menantu-Istri Andika	Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia kota Serang
Ratu Tatu	Adik Ratu Atut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua Palang Merah Indonesia Banten</li> <li>▪ Ketua Dewan Koperasi Indonesia Banten</li> <li>▪ Ketua Gerakan Nasional Kepedulian Sosial Banten</li> <li>▪ Ketua Masyarakat Agro Industri Indonesia Banten</li> <li>▪ Ketua Golkar Pandeglang</li> </ul>
Airin Rachmi Diany	Ipar-Istri Wawan-adik Ratu Atut	Ketua Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan
Wawan-Tubagus Chaeri Wardana	Adik Ratu Atut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketua Angkatan Muda Partai Golkar Banten</li> <li>▪ Ketua Kadin Banten</li> </ul>

Para anggota keluarga pada tabel di atas, tidak secara langsung berada di pusat kekuasaan, namun menikmati *political protection* dari oligark-sang kakak/istri yang sedang berkuasa, terutama demi keberlangsungan dan kesinambungan sebuah dinasti politik. Anak-anak dan keturunan Haji Chasan Sohib kemudian mengikuti jejaknya dalam memasuki kancah politik dan memilih Golkar sebagai kendaraan politik. Walaupun mereka tidak langsung berkuasa, tetapi karena kedekatan sering kali lebih berkuasa dari penguasa formal sendiri.

Dari beberapa nama tersebut, pada awalnya mengawali karir melalui jaringan informal yang kemudian masuk pada jajaran pemerintahan secara formal, antara lain: Andika Hazrumy menjadi Wakil Gubernur Banten, Ratu Tatu Chasanah menjabat Bupati Serang 2014-2020, Ratu Ria Maryana juga merupakan adik tiri Ratu Atut, kini dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang. Selain itu, Ria pun menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kota Serang. Kemudian Airin Rahmi Diany, Airin saat ini menjabat Wali Kota Tangerang Selatan periode 2016-2021.

Fenomena masuknya para anggota keluarga ke pemerintahan dikarenakan adanya keinginan dalam diri ataupun keluarga untuk memegang kekuasaan. Keluarga merupakan satu kelompok biologikal dan juga kelompok sosial yang secara relatif mempunyai anggota tetap. Sebab itu dihubungkan dengan aspek keturunan (darah), perkawinan ataupun keluarga angkat karena budaya.

Karena kedekatan inilah maka anggota keluarga diberi tanggung jawab utama, antara lain: 1. Tanggung jawab

ekonomi; 2. mencapai status ekonomi, sosial dan politik yang dicita-citakan; 3. mewujudkan rasa keadilan satu sama lainnya.<sup>17</sup> Di luar itu semua, para oligark menganggap "kesetiaan" sebagai satu sifat yang hanya dimiliki oleh keluarga, saudara atau kerabat dekat. Itulah yang menjadi argumen utama yang diterima untuk mempertahankan ataupun menjustifikasikan atas pelantikan-pelantikan yang berunsur personal. Orang-orang yang dipilih adalah mereka yang setia, bisa dipercaya dan mampu "bekerjasama".

Setelah jaringan keluarga terbentuk, maka mereka akan berusaha untuk menjaga solidaritas antar sesama anggota keluarga dari keluarga atau kelompok lain untuk mengisi jabatan-jabatan strategis yang menguntungkan.

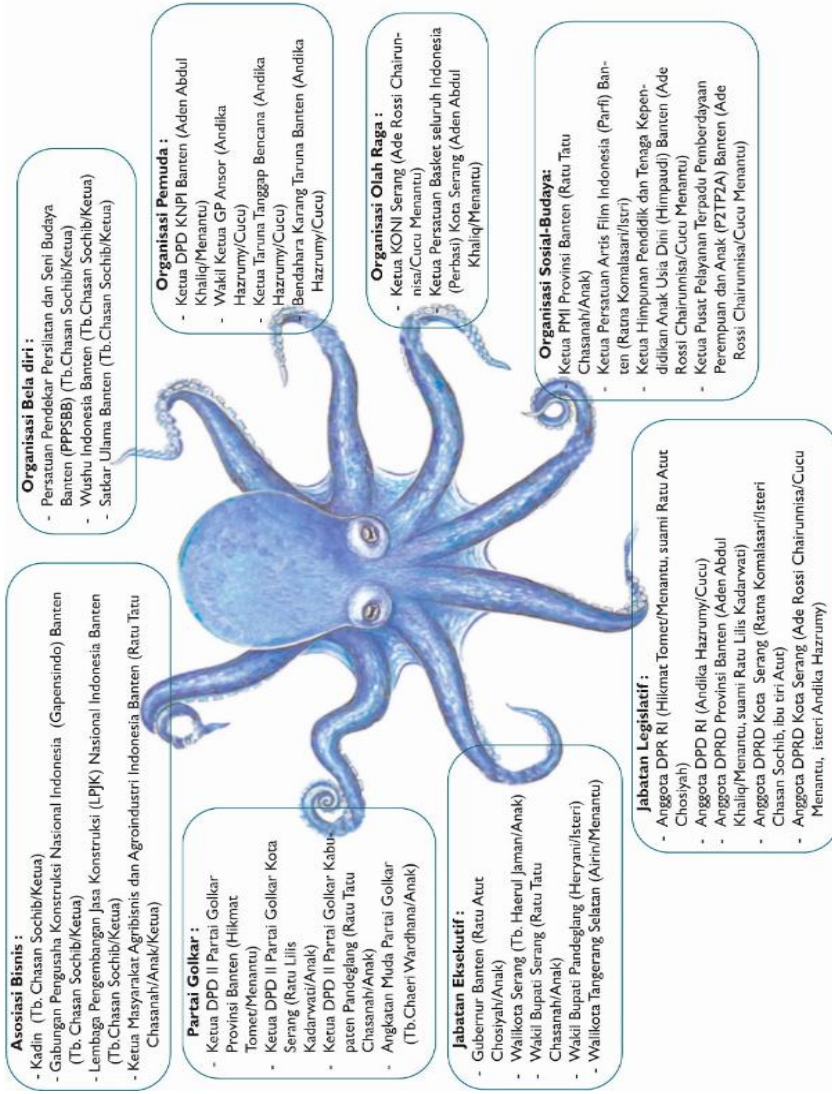
Politik kekeluargaan tersebut tidak jarang dikaitkan dengan praktik nepotisme, memberikan mereka keutamaan dan keistimewaan supaya dapat meningkatkan prestise keluarga, serta menambah pendapatan keluarga dalam rangka membentuk satu mesin politik bagi terbentuknya dinasti politik (dan bukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang banyak), sehingga mampu berdiaspora dan menggurita dan pada akhirnya mampu menentukan orientasi atau kepentingan ekonomi-politik keluarga dengan mengatasmakan lembaga dan jabatan-jabatan formal di pemerintahan.

Gambaran di atas memperkuat pendapat Oslo dan Jeffry Winters bahwa motif utama keberadaan *stationary bandits* dan *roving bandits* menurut Oslo atau oligarki dalam bentuk apapun dari Jeffry Winters adalah mempertahankan kekayaan dan harta, sebagai penopang dalam upaya

melanggengkan kekuasaannya agar tetap lestari dan berkesinambungan lintas atau antar generasi dengan menggunakan ikatan-ikatan patron-klien.

Sebaran penempatan keluarga dan kerabat Ratu Atut berada di semua lini, ibarat gurita yang menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat Banten baik formal maupun informal seperti tergambar pada Infografis-3 di bawah ini.

## Infografis-3: Sebaran Anggota Keluarga Ratu Atut semakin melebar-berjenjang



Sumber: Data diolah dari berbagai sumber

Sumber: <https://www.google.com/search?q=haji+chasan+sochib+,+diakses+tgl,+3-11-2020>

Keluarga menjadi cikal bakal pembentukan dinasti di Banten, yang berarti telah menimbulkan kesenjangan yang terpaut begitu lebar antara mereka yang memiliki akses karena kedekatan dengan sebagian orang yang tidak mempunyai akses atau kedekatan dengan keluarga Ratu Atut. Gejala patronase muncul dalam rekrutmen pegawai yang bersifat tertutup, eksklusif, tanpa kompetensi dan terbatas pada para pemegang sumber daya. Dalam kultur nepotisme hal ini memperoleh ruang yang ideal, dimana faktor kekerabatan keluarga mendapat tempat terbuka dalam konteks promosi. Fenomena birokrasi tersebut terkesan sebagai warisan kekuasaan dari nenek moyangnya yang dilimpahkan secara patronase dan nepotisme.

*Korupsi di Banten merupakan contoh sempurna sinergi kuasa oligarki, penguasa dengan pengusaha.*

# 3

## **Gurita Korupsi di Banten**

Para penyelenggara dinasti politik akan lebih mengutamakan kepentingan mereka secara ekonomi dan politik bukan demi kepentingan masyarakat.

Motif utama keberadaan oligarki apapun bentuknya adalah sama yaitu mempertahankan kekayaan dan hartanya.<sup>10</sup> Begitu pula dengan *stationary bandits* dan *roving bandits* dalam istilah dari Oslo atau dalam bentuknya yang sekarang berupa dinasti politik.

Menurut Peter Lamour<sup>18</sup> korupsi memiliki tiga domain yaitu *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan. *Kedua*, peminggiran suara rakyat dengan membungkam partisipasi publik. Cara bungkamnya bisa dengan hadiah dan atau membagi "mainan" kecil. *Ketiga*, perselingkuhan antara negara dan bisnis.

Dalam dinasti politik yang dibangun berdasar sistem kekerabatan, maka peran keluarga sangat memainkan peranan penting dalam praktik korupsi dan nepotisme seperti yang dijabarkan terdahulu. Para penyelenggara dinasti politik akan lebih mengutamakan kepentingan mereka secara ekonomi dan politik bukan demi kepentingan masyarakat. Mereka telah bertindak menyalahgunakan kekuasaan dan mengkhianati rakyat dengan bertindak seakan-akan berbuat baik untuk kepentingan rakyat tetapi pada kenyataannya mereka justru berjuang demi kejayaan dan kepentingan keluarga atau dinastinya saja.

Cara yang digunakan adalah Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Banten mengatur proses pelelangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah provinsi Banten. Atut dapat melakukannya karena setiap kepala dinas yang ditunjuk Atut lebih dulu membuat komitmen terhadap Atut untuk loyal kepada Wawan sehingga memudahkan Wawan untuk lebih leluasa dalam



mengatur proyek-proyek pekerjaan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Banten.<sup>19</sup>

Dan pada Infografis-4<sup>20</sup> di bawah ini tampak jumlah anggota keluarga yang masuk dalam dinasti politik terus bertambah, tidak saja anggota keluarga inti tetapi juga beberapa ibu tiri, ipar, dan menantu yang masuk sebagai kroni Ratu Atut. Mereka menyerbu masuk menjadi oligark dominan dalam sekejap, yang turut mengelola bisnis/perusahaan yang dikendalikan oleh Ratu Atut. Karena nilai politis manajemen akses dan proteksi dari Ratu Atut pun semakin tinggi untuk keberlangsungan dinasti politik yang dibangunnya.

Infografis-4: Dinasti Politik Keluarga Ratu Atut



Sumber:

<https://www.google.com/search?q=haji+chasan+sochib+&tbm, diakses tgl, 3-11-2020.>

Merujuk hasil kajian Leo Agustino<sup>12</sup> dan Irawan dkk.,<sup>21</sup> keluarga Ratu Atut memonopoli hampir seluruh kehidupan politik dan ekonomi di Provinsi Banten sehingga **Tempo**<sup>22</sup> sempat menyebutnya sebagai "Atut & Co" atau "Atut Chosiyah Incorporated". Ratu Atut menguasai sebelas bisnis/ perusahaan yang dikendalikan keluarga Ratu Atut dan duapuluh empat bisnis/ perusahaan yang dikendalikan kroni Ratu Atut.<sup>18</sup> Seperti tampak pada Infografis-5 di bawah ini.

Infografis-5: Bisnis/Perusahaan yang Dikendalikan Keluarga Ratu Atut



Sumber:

<https://www.google.com/search?q=Ratu+Atut+and+Co&tbm, diakses tgl, 3-11-2020.>

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebutkan, "Sejak didirikan 17 tahun lalu hingga hari ini, KPK telah menetapkan 119 kepala daerah sebagai tersangka kasus rasuah. Ia mengatakan Jawa Timur dan Jawa Barat menempati urutan teratas berdasarkan jumlah kepala daerah yang menjadi tersangka tersebut. Akan tetapi, jika dihitung dari besarnya uang negara yang dirampok atau hilang, kedua provinsi itu kalah jauh dari Banten. Tapi dari kasus yang kami temukan di sana korupsinya terjadi cukup masif", kata Febri di Jakarta, Rabu (9/10). Salah satu korupsi besar-besaran di Banten diduga dilakukan suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Wawan yang juga adik eks Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah itu diduga mendapat uang panas dari pengerjaan 1.105 proyek di Provinsi Banten. KPK mengindikasikan semua proyek yang dikerjakan perusahaan Wawan tersebut didapat lewat proses nepotisme, yakni dengan memanfaatkan hubungan Wawan dan para pejabat di provinsi tersebut.<sup>23</sup> Modus Korupsi yang dilakukan Wawan, pada awalnya fokus pada mengerahkan pengerjaan program-program di empat dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah yakni:<sup>1</sup> Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang, dan Dinas Pekerjaan Umum.

Wawan melalui Ratu Atut dapat mengatur proses pelelangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan cara, beberapa kepala dinas yang ditunjuk oleh Ratu Atut membuat komitmen di hadapan Ratu Atut untuk loyal kepada Wawan. Wawan juga mampu melakukan pengurusan anggaran proyek-proyek pada SKPD tersebut di DPRD dengan cara melakukan pendekatan dengan pihak DPRD Banten, supaya proyek-proyek yang sudah masuk

dalam Rancangan APBD tersebut agar disetujui atau disahkan oleh DPRD menjadi APBD dengan cara memberikan sejumlah uang dan fasilitas mobil kepada beberapa anggota DPRD.

## **Korupsi untuk Pembiayaan Pilkada**

Pada awalnya, Wawan fokus di empat Dinas yang dinilai menguntungkan namun dalam perkembangannya kemudian tampak bahwa pengaruh Wawan juga merambah ke bidang-bidang lain, termasuk di ranah politik dengan membiayai Pilkada istri dan kakak-kakaknya dari hasil korupsi antara lain:

1. Wawan yang membiayai Pilkada Tangerang Selatan, 2010- istri-Airin Rachmi Diani, sejumlah uang Rp 2,9 miliar.
2. Wawan yang membiayai Pilkada Kakaknya Ratu Tatu Chasanah pada Pilkada Kabupaten Serang, dengan biaya sebesar Rp 4,54 miliar.
3. Wawan membantu pula pembiayaan kakaknya, Ratu Atut, dalam Pemilihan Gubernur Banten 2011, sejumlah Rp 3,83 miliar.

## **Modus Pencucian Uang *ala* Wawan**

Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat FH UGM) Zaenur Rochman mengatakan kepada reporter *Tirto*, Rabu (9/10/2019),<sup>24</sup> kalau kasus Wawan

“merupakan salah satu kasus terbesar yang dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)”. Dan memang begitu faktanya. Kasus Wawan, misalnya,

- Melebihi kasus korupsi bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum yang mencapai lebih dari Rp 117 miliar dan 5,5 juta dolar AS (jika dirupiahkan sekitar Rp71, 5 miliar).
- Korupsi Wawan juga melebihi kasus simulator SIM Irjen Pol Djoko Susilo. Djoko dinilai korupsi hingga Rp54,6 Miliar dan 60 ribu dolar AS dalam kurun waktu 2003-2010.
- Hasil korupsi Wawan juga lebih banyak ketimbang kasus pencucian uang eks Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari. Dalam kasus TPPU, Rita diduga mencuci uang hingga Rp436 Miliar.

Sejalan dengan itu, Wakil Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Erdiana Rae mengatakan ada 15.458 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan di Banten sepanjang tahun 2010 sampai dengan 2018. Akibatnya, Banten masuk zona merah dan posisi ke-4 nasional kawasan berpotensi terjadinya pencucian uang. Para pelaku yang melakukan tindak pencucian uang terjadi pada semua profesi seperti pejabat pemerintah, tokoh politik, pegawai swasta, pengusaha, dan pedagang.<sup>25</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa PPATK merilis bahwa Provinsi Banten di urutan keempat dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia tentang Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan total dari tahun 2003 sampai Oktober 2018 ada sebanyak 414.299 LTKM dengan pasca UU TPPU sebanyak 350.375 LTKM dan Banten sebanyak

15.458 LTKM atau posisi Provinsi Banten urutan keempat, dengan tren dari tahun 2010 sampai Oktober 2018 semakin meningkat sebanyak 15.458 LTKM.<sup>25</sup>

Wakil Kepala PPATK Dian Erdiana Rae<sup>25</sup> mengatakan bahwa Tangerang raya menempati posisi pertama meliputi Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang sebagai dan termasuk zona merah karena masuk di lima besar, bersama dengan Provinsi Banten.

Wawan menggunakan berbagai modus dalam melakukan pencucian uang demi mengamankan kekayaan dan hartanya. Hal ini menggambarkan bahwa perusahaan-perusahaan yang dibuat Wawan hanyalah upaya menyembunyikan dana kejahatan ke dalam kegiatan normal dari bisnis atau ke dalam perusahaan yang telah ada yang dikendalikan oleh PT BPP hal ini termasuk tipologi pencucian uang yang sering dikenal dengan "*concealment within business structure*". Dalam persidangan, terbukti Wawan melakukan pencucian uang dengan menggunakan modus antara lain:

- **Modus pertama** dengan sengaja mencampuradukkan rekening penerima pembayaran proyek dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan rekening untuk menampung pinjaman kredit modal kerja (KMK) atas nama PT Bali Pasific Pragama (rekening escrow).
- **Modus kedua**, Wawan sengaja mencampuradukkan rekening kredit pinjaman Griya atas nama Tubagus Chaeri Wardana dengan rekening PT BPP, PT BWU, PT PPJ dan rekening Yayah Rodiah yang berasal dari

pembayaran proyek yang didapatkan secara melawan hukum.

- **Modus ketiga**, uang-uang hasil proyek yang didapatkan secara melawan hukum dan sudah ditempatkan di berbagai rekening itu sebagian besar dilakukan transaksi-transaksi setor/tarik tunai oleh staf PT BPP dan ditransfer ke rekening Yayah Rodiah dan perusahaan lainnya yang kegunaannya berdasarkan pengakuan Yayah Rodiah untuk pembelian/ pembayaran aset milik Wawan dan memberikan suap ke pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan proyek lagi, membiayai Pilkada Banten, Lebak, dan Serang serta membuat surat Perjanjian Pemborongan Pembangunan SPBE.
- **Modus Keempat**, ada juga yang sebagian transaksinya ditarik tunai dalam jumlah yang lebih kecil dan disetor kembali ke rekening lainnya (*structuring*), maupun disetor oleh beberapa pihak pada tanggal yang hampir bersamaan (*smurfing*), sehingga hal ini merupakan tindakan "*layering*" untuk menyamarkan asal-usulnya.
- **Modus Kelima**, ada upaya pengalihan kepemilikan terhadap beberapa harta Wawan yang semula atas namanya lalu dialihkan menjadi atas nama orang lain atau dari nama orang lain lalu dialihkan kepada orang lain berikutnya dengan cara seolah-olah dijual, atau dipinjamkan ke orang lain padahal orang-orang tersebut berada di bawah kendali Wawan (*secara de facto*).
- **Modus Keenam**, modus "*integration*" yaitu membuat usaha bisnis yang sah yang bersumber dari "*fee*" dan uang proyek yang didapatkan secara melawan hukum seperti usaha radio, SPBU, SPBE, hotel, penyewaan apartemen yang selanjutnya hasil dari kegiatan usaha seolah-olah sah.

- **Modus Ketujuh**, modus "*concealment within business structure*". Wawan tidak memberikan informasi yang benar saat memberikan kewajiban laporan SPT pajak tahunan baik sebagai wajib pajak pribadi maupun perusahaannya, bahkan beberapa perusahaannya seperti PT BWY, PT PPJ, dan PT CMI tercatat sebagai wajib pajak tidak patuh karena tidak melaporkan SPT penghasilan setiap tahun.



# 4

## **Tubagus Chaeri Wardana, Pangeran Banten**

Dalam keluarga besar Chasan Sochib, Wawan memegang peran sentral dalam dinasti kepemimpinan Ratu Atut di Banten.

Setelah Tubagus Haji Chassan Sochib wafat tahun 2011, Wawan memegang posisi sentral yang mengkonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi di Banten. Ia juga merupakan suami dari Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany.

Wawan tampil sebagai aktor intelektual dan menggunakan posisinya sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Banten untuk menggantikan ayahnya. Pakar politik Universitas Sultan



Ageng Tirtayasa, Gandung Ismanto, mengatakan Wawan adalah makelar proyek yang menentukan siapa mendapat apa, siapa mengerjakan pekerjaan tertentu, dan siapa menjadi apa di pemerintahan. Para Tokoh budaya yang setia kepada Tubagus Haji Chasan Sochib (saat masih hidup), kini melanjutkan kesetiaannya kepada putranya, Wawan. "Karena mereka mendapatkan *fee* proyek dari masing-masing proyek APBD dan APBN di Banten," kata Gandung.<sup>26</sup>

Gandung melanjutkan bahwa dalam keluarga besar Chasan Sochib, Wawan memegang peran sentral dalam dinasti kepemimpinan Ratu Atut di Banten. Saat ayahnya masih memerintah Banten, Chasan membangun fondasi budaya untuk mengkonsolidasikan seluruh tokoh budaya di Banten. Konsolidasi itu terus berlangsung hingga kini meski Chasan telah meninggal dunia. Menurut Gandung, saat ini

konsolidasi diteruskan ke Wawan. Selain itu, posisinya sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) di Provinsi Banten semakin memperkuat posisi keluarga Ratu Atut dalam pemerintahan Banten.

Wawan adalah “aktor” non-negara yang sebagian besar bertindak lebih kuat daripada penguasa formal di Banten sendiri. Kekuasaannya seringkali melebihi pejabat pemerintah lainnya dengan posisi formal.

Wawan, sang Pangeran Banten lekat dengan kasus suap, pencucian uang dan lain sebagainya. Selain diduga melibatkan banyak penyelenggara negara, kasus Wawan juga melibatkan sejumlah artis. Wawan juga didakwa melakukan pencucian uang (TPPU). Dia mencuci uang yang diduga hasil korupsi lebih dari Rp500 miliar. Uang Wawan disinyalir mengalir ke sejumlah pihak. Wawan sebagai pelaku utama, sedangkan para artis adalah ommisi atau pelaku pasif.

Dalam kasus Wawan, menjadi bukti sinergi antara oligark-Penguasa-Ratu Atut Chosiyah (kakak) sebagai Gubernur Banten dengan Pengusaha swasta-Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik) di ranah ekonomi-politik, yang berakar kuat pada adanya kelindan praktik korupsi sehingga menyandera negara (*state-captured corruption*) dengan cara melemahkan fungsi otoritas kelembagaan pemerintahan daerah Banten.

Hal ini sebagai akibat dari kuatnya praktik kuasa *institusi alternative* atau *informal state governance* oleh suatu jaringan yang dipelihara oleh penguasa, yang berada di luar

negara (*beyond state*), yang secara *de facto* lebih besar pengaruhnya daripada kekuasaan formal negara sendiri.

Negara Bayangan yang dipraktikkan Ratu Atut Chosiyah di Provinsi Banten menjadi "model" praktik korupsi akut di lembaga pemerintahan dan institusi politik kenegaraan. Berbagai skandal suap dan korupsi berskala besar yang diperantarai oleh anggota keluarganya sendiri serta melibatkan politisi dan pejabat negara satu partai, menjelaskan betapa negara bayangan beroperasi dan terorganisir.

Berbagai praktik *illicit transaction* terutama suap, hanya memberikan keuntungan pribadi dan kelompok serta lingkaran dalam keluarga, yang telah menopang dan menjadi tiang penyangga pemerintahan Ratu Atut Chosiyah.

# 5

## **Dampak Korupsi dari Dinasti Politik Ratu Atut**

Hampir seluruh lingkup pemerintahan di Provinsi Banten baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota di Banten, bidang pemerintahannya dimonopoli oleh keluarga Gubernur Banten.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Banten tercatat sebagai salah satu provinsi terkorup. Di antaranya adalah faktor monopoli kekuasaan di bidang pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena hampir seluruh lingkup pemerintahan di Provinsi Banten baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota di Banten, bidang pemerintahannya dimonopoli oleh keluarga Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

- **Tahun 2010**

Banten masuk urutan 15 provinsi terkorup.

- **Tahun 2013**

- Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2013, BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat. Alasan BPK memberikan opini tidak memberikan pendapat atau *disclaimer* atas LHP tersebut karena BPK menemukan sejumlah permasalahan yang cukup material yang ditemukan.<sup>27</sup>
- angka putus sekolah di Banten masih sangat tinggi.<sup>28</sup>
- Pada tahun 2012/2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten sebesar 648.300 jiwa berada pada peringkat ke-12 tertinggi dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia.

- **Tahun 2014**

- Tidak berbeda dengan tahun sebelumnya, opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 adalah Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten menemukan beberapa kelemahan yang perlu segera diperbaiki.<sup>29</sup>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyatakan dalam enam bulan sejak Maret hingga

September 2014, jumlah penduduk miskin di wilayah ini bertambah 26.350 jiwa. Dengan demikian, angka kemiskinan di Banten mencapai 649.190 jiwa atau setara dengan 5,51 persen dari total penduduk.

- Angka Putus Sekolah di Banten Masih Sangat Tinggi.
- Pelaksana tugas sekretaris Provinsi Banten Asmudji HW menyatakan angka pengangguran di daerah itu masih relatif tinggi, bahkan melebihi angka rata-rata nasional.<sup>30</sup>

Terhadap Pemerintah Provinsi Banten. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, KPK melakukan pendampingan dengan tugas utama pada pencegahan fokus pada enam bidang antara lain:

1. Pengelolaan APBD Banten agar lebih disempurnakan sistem penganggarannya.
2. Pengadaan barang dan jasa, guna menghindari adanya transaksi tidak wajar dalam lelang proyek dan pengerjaan di Banten.
3. Pelayanan izin dan nonperizinan agar tetap satu pintu di Badan Koordinasi Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Banten.
4. Terkait pendapatan daerah yang salah satunya menggunakan e-Samsat yang mencontoh dari Jawa Barat (Jabar) dan menambah pendapatan daerah dari sektor lainnya.
5. Pengelolaan dan manajemen SDM pegawai di Banten agar lebih diperbaiki.
6. Pengelolaan SDM Pemprov Banten ke depan agar lebih diperbaiki, khususnya dalam proses mutasi dan rotasi pejabat.

Dengan demikian, Gubernur Ratu Atut tidak membangun Banten sebagaimana yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh para leluhurnya.



# 6

**Penutup:  
Harapan Pembaruan  
Politik Banten**

Penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan di depan dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari pengumpulan dokumen dan wawancara singkat dengan beberapa informan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya *local strongman* yang penuh digdaya secara sosial-politik-ekonomi dan budaya di Banten. Evolusi dari Jawara menjadi *roving bandit* berupa *local strongman* kemudian bertransformasi menjadi pejabat, tidak lepas dari perannya sebagai *local bosses* di Partai Golongan Karya (Golkar) menuju pembentukan dinasti politik. Haji Chasan Sohib meneladani Soeharto dalam hal patronase dan kekerabatan untuk mengamankan kekayaan dan pengaruhnya di pemerintahan, politik dan kemasyarakatan. Tradisi melanggengkan kekuasaan pada awalnya dari instink setiap individu yang melembaga dalam kelompok seperti dinasti, klan atau marga. Ekstensifikasi kekuasaan muncul pada kelompok orang yang mengendalikan sumber daya.
2. Adanya sinergitas yang kuat dan melembaga antara Penguasa-penyelenggara Pemerintahan Daerah-Formal dengan Pengusaha –dengan tetap berada di luar pemerintahan secara formal– yang saling berkelindan dan bersinergi sehingga menjerat seluruh sendi kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Banten, ibarat *octopussy*. Dalam kasus Wawan, menjadi bukti sinergi antara Oligark-Penguasa-Ratu Atut Chosiyah (kakak) sebagai Gubernur Banten dengan Pengusaha swasta-Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik) di ranah ekonomi-politik, yang berakar kuat pada adanya kelindan praktik korupsi sehingga menyandera negara

(*state-captured corruption*) dengan cara melemahkan fungsi otoritas kelembagaan pemerintahan daerah Banten.

Tujuan sinergitas tersebut untuk menggabungkan antara kekuatan modal dan kekuatan politik. Dengan adanya pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan modal sehingga mengakibatkan terjadinya korupsi. Hal ini didukung pula dengan ambisi dalam diri dan keluarga untuk memegang kekuasaan diimbui dengan kekosongan etikalitas pemerintahan.

Adapun saran yang disampaikan sebagai pengembangan akademis dan untuk para penyelenggara negara serta masyarakat pada umumnya berupa:

1. Partai Politik sebagai salah satu pilar demokrasi, perlu memperbaiki mekanisme pencalonan kandidat yang akan berkontestasi di Pilkada. Disarankan agar partai politik melakukan konvensi internal di partai politik masing-masing bukan berdasarkan Surat Keputusan Partai. Karena bila partai tidak demokratis maka kemudian yang terjadi adalah oligarki.
2. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat tidak permisif setiap kali Pilkada digelar untuk tidak memilih para calon yang mempunyai ikatan persaudaraan yang mempunyai ambisi untuk memperkuat dan memperkaya klannya saja dengan tidak mudah tergiur dengan iming-iming beras-baju dan uang.

## CATATAN

1. Atika Nur Kusumaningtyas dkk, *Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal*, Jurnal Penelitian Politik Pusat Penelitian Politik LIPI, 2016.
2. Oslo, M., *Dictatorship, Democracy, and Development*, The American Political Science Review 87(3): 567-576, 1993.
3. Kompas.com dengan judul "*Sepuluh Tahun Pasca Reformasi, Makin Banyak Roving Bandits*", <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/08/17203151/sepuluh.tahun.pasca.reformasi.makin.banyak.roving.bandits>
4. <https://lektur.id/sinonim-bandit/#>
5. Bandiyah, "*Evolusi Jawara di Banten (Studi Evolusi dari Bandit Menjadi Pejabat)*," *Interaktif*, Vol. 1, No. 2, 2010.
6. John W. Creswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
7. Sidel, John (2009) "*Walking in the shadow of the big man: Junstiniano Montano and failed dynasty building in Cavite 1935-1972*". In: McCoy, Alfred W., (ed.) *An anarchy of families: state and family in the Philippines*. University of Wisconsin Press, Madison, USA, pp. 109-162
8. Migdal, Joe S., *Strong Societies and Weak State: State-society Relations and State Capabilities in the world*, Princeton: Princeton University Press, 1998.

9. Vedi R. Hadiz, *Localizing Power in post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asean Perspective*, California: Stanford University Press, 2010.
10. Jeffrey A. Winters, *Oligarki*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.
11. Syarif Hidayat, *Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten: dalam Politik Lokal di Indonesia*, Obor, Jakarta. 2007.
12. Leo Agustino, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabet, Bandung, 2014.
13. Jeffrey A. Winters, detiknews, 18 April 2011, pukul 12:58 WIB.
14. Chehabi, H.E., & Juan J. Linz, *Sultanistic Regimes*, Baltimore & London: The Johns Hopkins Press, 1998.
15. Leo Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah*, Widya Padjadjaran, 2011.
16. Kompas.com dengan judul "*Politik Dinasti di Banten Dinilai Masih Kuat*", <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/06420791/politik.dinasti.di.banten.dinilai.masih.kuat>. Penulis: Rakhmat Nur Hakim.
17. Mair, L., *An Introduction to Social Anthropology*, Oxford University Press, 1991.
18. Peter Lamour, *Interpreting Corruption: Culture and Politics in the Pacific Island*, 2012.
19. <https://www.redaksi24.com/menelisik-modus-dugaan-cuci-uang-ala-tubagus-chaeri-wardana/>
20. <https://jsi.web.id/2013/12/inilah-harta-karun-dan-tahta-dinasti-ratu-atut-chosiyah/>
21. Irawan, Ade, Wisudo, Bambang, Hambali, Ginanjar dan Baga, Fuaduddin, *Dinasti Banten: Keruntuhan dan Kebangkitan kembali*, Malang, Intrans Publising, 2016.

22. Berita mingguan Tempo, edisi 4-10 November 2013, Laporan Utama. Tanggal rilis: 04 November 2013. Laporan utama 34 – HARTA DAN TAKHTA KLAN BANTEN.
23. <https://medaninside.com/kpk-sebut-gurita-korupsi-di-banten-kalahkan-dua-provinsi-besar/> 10 Oktober 2019.
24. Baca selengkapnya di artikel "Megakorupsi Tubagus Chaeri Wardana dan Jejak Kekayaan Dinasti Atut", <https://tirto.id/ejvC>
25. <https://news.detik.com/berita/d-4324165/ppatk-ada-15458-laporan-transaksi-mencurigakan-di-banten>, Bahtiar Rifa'i – detikNews, Jumat, 30 November 2018, Pukul 10:12 WIB
26. Gandung. <https://jogja.tribunnews.com/2013/10/11/pengamat-dinasti-politik-ratu-atut-tak-akan-langsung-runtuh>, diakses, 10 Agustus 2019, pukul 12:17 WIB.
27. <https://banten.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-lhp-atas-laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-banten-ta-2013/>
28. <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/103324/angka-putus-sekolah-di-banten-masih-sangat-tinggi>
29. <https://banten.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-banten-ta-2014/>
30. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/06/nbhdcf-angka-pengangguran-di-banten-masih-tinggi>

## Daftar Pustaka

- Ade, Irawan, dkk., *Dinasti Banten: Keruntuhan dan Kebangkitan kembali*, Malang, Intrans Publising, 2016.
- Agustino, Leo, *Sisi Gelap Otonomi Daerah*, Widya Padjadjaran, 2011.
- , *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Baca selengkapnya di artikel "Megakorupsi Tubagus Chaeri Wardana dan Jejak Kekayaan Dinasti Atut", <https://tirto.id/ejvC>
- Bandiyah, "Evolusi Jawara di Banten (Studi Evolusi dari Bandit Menjadi Pejabat). "Interaktif, vol. 1, no. 2, 2010.
- Berita mingguan Tempo, edisi 4-10 November 2013, Laporan Utama, Tanggal rilis: 04 November 2013. Laporan utama 34 – HARTA DAN TAKHTA KLAN BANTEN
- Creswell, John W., *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016.
- Gandung, <https://jogja.tribunnews.com/2013/10/11/pengamat-dinasti-politik-ratu-atut-tak-akan-langsung-runtuh>, diakses: 10 Agustus 2019, Pukul 12:17 WIB.

- H.E., Chehabi, & Linz, Juan J., *Sultanistic Regimes*, Baltimore & London: The Johns Hopkins Press, 1998.
- Hadiz, Vedi R., *Localising Power in post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asean Perspective*, California: Stanford University Press, 2010.
- Hidayat, Syarif, *Shadow State...? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten: dalam Politik Lokal di Indonesia*, Obor, Jakarta, 2007.
- <https://banten.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-atas-laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-banten-ta-2014/>
- <https://banten.bpk.go.id/penyerahan-laporan-hasil-pemeriksaan-lhp-atas-laporan-keuangan-pemerintah-provinsi-banten-ta-2013/>
- <https://jsi.web.id/2013/12/inilah-harta-karun-dan-tahta-dinasti-ratu-atut-chosiyah/>
- <https://lektur.id/sinonim-bandit/#>
- <https://medaninside.com/kpk-sebut-gurita-korupsi-di-banten-kalahkan-dua-provinsi-besar/10> Oktober 2019.
- <https://news.detik.com/berita/d-4324165/ppatk-ada-15458-laporan-transaksi-mencurigakan-di-banten>, Bahtiar Rifa'i – detiknews, Jumat, 30 November 2018, Pukul 10:12 WIB
- <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/103324/angka-putus-sekolah-di-banten-masih-sangat-tinggi>
- <https://www.redaksi24.com/menelisik-modus-dugaan-cuci-uang-ala-tubagus-chaeri-wardana/>
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/06/nbhdcf-angka-pengangguran-di-banten-masih-tinggi>



- Kompas.com dengan judul "Sepuluh Tahun Pasca Reformasi, Makin Banyak Roving Bandits", <https://nasional.kompas.com/read/2008/07/08/17203151/sepuluh.tahun.pasca.reformasi.makin.banyak.roving.bandits>
- Joe S., Migdal, *Strong Societies and weak state: State-society Relations and State Capabilities in the world*, Princeton: Princeton University Press, 1998.
- John, Sidel, "Walking in the shadow of the big man: Junstiniano Montano and failed dynasty building in Cavite 1935-1972". In: McCoy, Alfred W., (ed.) *An anarchy of families: state and family in the Philippines*. University of Wisconsin Press, Madison, USA, pp. 109-162.
- Kompas.com dengan judul "Politik Dinasti di Banten Dinilai Masih Kuat", <http://nasional.kompas.com/read/2017/01/04/06420791/politik.dinasti.di.banten.dinilai.masih.kuat>. Penulis: Rakhmat Nur Hakim.
- Kusumaningtyas, Atika Nur dkk., *Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal*, Jurnal Penelitian Politik Pusat Penelitian Politik LIPI, 2016.
- L., Mair, *An Introduction to Social Anthropology*, Oxford University Press, 1991.
- Lamour, Peter, *Interpreting Corruption: Culture and Politics in the Pacific Islands*, 2012.
- M., Oslo, *Dictatorship, Democracy, and Development*, *The American Political Science Review* 87(3): 567-576, 1993.
- Winters, Jeffrey A., detiknews, 18 April 2011, Pukul 12:58 WIB.
- , *Oligarki*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

## Tentang Penulis



**Amalia Syauket**, dosen profesional dalam bidang ilmu pemerintahan. Ber-*home base* pada program studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sejak tahun 2018. Aktif melaksanakan tridarma dalam bidang anti korupsi dan otonomi daerah, sebagai Peneliti pada Pusat Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi juga sebagai dosen Koordinator

Pendidikan Anti Korupsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Telah menyelesaikan program Doktor dari Universitas Padjadjaran tahun 2013 pada program studi ilmu pemerintahan.

Tahun 2000 menyelesaikan pendidikan Magister ilmu pemerintahan dari Universitas Satyagama. Menyelesaikan Sarjana dari Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman.

Beberapa publikasi terbaik, antara lain:

- 2021, Otonomi Daerah Perspektif Human Security dalam Negara Demokrasi, Buku Ajar.
- 2020, Sejarah Komitmen Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Monograf, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta.
- 2020, Woman Government Officials in The Circle of Corruption, Proceeding, ICJSET.
- 2019, Perempuan dalam Pusaran Korupsi, Monograf, Kreasi Cendikia Pustaka, Jakarta
- 2019, Corruption & Patron-Client (Understanding Shadow State Case in Banten), Proceeding, Atlantis Press.
- 2019, Perspektif Human Security pada Implementasi OTONOMI DAERAH, Modul Pembelajaran.

# OCTOPUSSY Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten

*by Amalia Syauket*

---

**Submission date:** 19-Jun-2021 11:07PM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1609246517

**File name:** OCTOPUSSY\_22\_MEI-1.pdf (1.3M)

**Word count:** 9317

**Character count:** 60363

# OCTOPUSSY Sinergi Penguasa dan Pengusaha Tipologi Gurita Korupsi di Banten

## ORIGINALITY REPORT

14%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://diah-ayu-roro-fisip15.web.unair.ac.id">diah-ayu-roro-fisip15.web.unair.ac.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://www.redaksi24.com">www.redaksi24.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://syukriy.wordpress.com">syukriy.wordpress.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://ojs.umrah.ac.id">ojs.umrah.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.indonesiana.id">www.indonesiana.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://jurnal.umb.ac.id">jurnal.umb.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://e-service.lipipress.lipi.go.id">e-service.lipipress.lipi.go.id</a> Internet Source	1%
8	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
9	<a href="http://www.ariantokadir.com">www.ariantokadir.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://rekor.blogspot.com">rekor.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://www.aipi-politik.org">www.aipi-politik.org</a> Internet Source	1%
12	Ahmad Muchlisin Natas Pasaribu, Asrori Yudhaprawira. "Pelatihan Strength And	<1%

Conditioning Atlet Bulu Tangkis Di Metland  
Jakarta Timur", Jurnal Pengabdian kepada  
Masyarakat UBJ, 2020

Publication

13

[www.seputarbanten.com](http://www.seputarbanten.com)

Internet Source

<1 %

14

Submitted to Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

Student Paper

<1 %

15

[jpi.ubb.ac.id](http://jpi.ubb.ac.id)

Internet Source

<1 %

16

Djoni Gunanto. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti  
di Indonesia", Sawala : Jurnal Administrasi  
Negara, 2020

Publication

<1 %

17

[nasional.kompas.com](http://nasional.kompas.com)

Internet Source

<1 %

18

[kronologi.id](http://kronologi.id)

Internet Source

<1 %

19

Submitted to Institut Pemerintahan Dalam  
Negeri

Student Paper

<1 %

20

[makulekosy.blogspot.com](http://makulekosy.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

21

[news.detik.com](http://news.detik.com)

Internet Source

<1 %

22

[journal.ugm.ac.id](http://journal.ugm.ac.id)

Internet Source

<1 %

23

[lektur.id](http://lektur.id)

Internet Source

<1 %

24

[www.muslimahnews.com](http://www.muslimahnews.com)

Internet Source

<1 %

[blb.davidhaward.it](http://blb.davidhaward.it)

25	Internet Source	<1 %
26	<a href="http://hlalrema.blogspot.com">hlalrema.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.nomis.id">www.nomis.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://debustitb.wordpress.com">debustitb.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://interoperabilitas.blogspot.com">interoperabilitas.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://pkitgusdur.blogspot.com">pkitgusdur.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
32	Patih Rinto Abadi, Muhammad Hanif. "Pengaruh Penggunaan Media Blog Terhadap Prestasi Belajar IPS-Sejarah Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sukomoro Kabupaten Magetan", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015 Publication	<1 %
33	<a href="http://adji.wordpress.com">adji.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
34	<a href="http://geotimes.id">geotimes.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://giyantolin.blogspot.com">giyantolin.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://lpmrhetor.com">lpmrhetor.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://wartaekonomi.co.id">wartaekonomi.co.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On